

PENGUATAN PERAN KURIKULUM MERDEKA DAN SDGS DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DI SEKOLAH DASAR

Qonitah Az Zahra *¹
Nur Elva Faradisa ²
Ichsan Fauzi Rachman ³

^{1,2} Universitas Siliwangi

*e-mail: qonitahazzahra4@gmail.com¹, nurelvaf@gmail.com², ichsanfauzirachman@unsil.ac.id³

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, khususnya pada pendidikan di tingkat sekolah dasar. Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji kontribusi kurikulum merdeka dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mendukung sebuah pendidikan yang responsif dan inklusif terhadap keberagaman sosial ekonomi beserta pendidik. Dengan menggunakan metode literatur review, kajian ini menganalisis berbagai sumber ilmiah dengan tujuan untuk memahami keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum merdeka dapat memberikan fleksibilitas dalam proses pengembangan pembelajaran yang adaptif serta memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan siswa dengan latar belakang yang kurang mampu. Sementara itu, prinsip-prinsip SDGs, khususnya mengenai "Pendidikan Berkualitas", memperkuat komitmen global terhadap pemerataan akses pendidikan. Kombinasi antara fleksibilitas kurikulum serta kerangka kerja global SDGs dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil serta meningkatkan peluang ekonomi bagi peserta didik yang kurang mampu. Meski demikian, dalam proses implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya pelatihan guru, dan stigma sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, serta masyarakat dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif yang berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam setiap pengambilan keputusan serta perumusan strategi pendidikan yang lebih inklusif dengan tujuan mengatasi kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kemiskinan, Kurikulum Merdeka, Pendidikan Inklusif, SDGs, Sekolah Dasar

Abstract

Inclusive education is key to realizing sustainable development and poverty alleviation, especially in education at the elementary school level. The study aims to examine the contribution of the independent curriculum and the Sustainable Development Goals (SDGs) in supporting responsive and inclusive education for socio-economic diversity and educators. Using the literature review method, this study analyzes various scientific sources with the aim of understanding the relationship between education policy and poverty alleviation. The results of the study indicate that the independent curriculum can provide flexibility in the process of developing adaptive learning and has an important role in meeting the needs of students from disadvantaged backgrounds. Meanwhile, the principles of the SDGs, especially regarding "Quality Education", strengthen the global commitment to equal access to education. The combination of curriculum flexibility and the global SDGs framework can create a fair learning environment and increase economic opportunities for disadvantaged students. However, the process of implementing inclusive education still faces various challenges such as limited infrastructure, minimal teacher training, and social stigma. Therefore, cooperation is needed between the government, schools, and the community in supporting sustainable inclusive education policies. This study is expected to be a reference in every decision-making and formulation of more inclusive education strategies with the aim of overcoming poverty systematically and sustainably.

Keywords: Elementary School, Independent Curriculum, Inclusive Education, Poverty, SDGs

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup setiap individu. Sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, Pendidikan

inklusif menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan sosial, termasuk kemiskinan. Pendidikan inklusif tidak hanya memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hal ini tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun kondisi fisik mereka, mendapatkan akses yang setara terhadap pembelajaran, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Amaliyah et al., 2025).

Kurikulum merdeka adalah salah satu kebijakan pendidikan yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah serta para pendidik dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan seluruh siswa. Dengan melakukan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kompetensi, Kurikulum Merdeka memungkinkan setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi dan minat para peserta didik. Hal ini sejalan dengan Pendidikan inklusif yang menekankan pada penghormatan terhadap keberagaman serta pemberian kesempatan yang sama bagi semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu (Fadil & Isna Alfaien, 2023).

Di sisi lain, SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan pendidikan sebagai salah satu tujuan utama suatu bangsa dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan global. SDG keempat, yaitu "Pendidikan Berkualitas", menentukan pentingnya akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak (Fitriyah & Nugraheni, 2024). Implementasi SDGs dalam Pendidikan nasional, khususnya di sekolah dasar menjadi salah satu langkah yang cukup strategis dalam memastikan bahwa setiap anak harus mendapatkan kesempatan belajar yang optimal, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan memiliki masa depan yang lebih baik (Fadil & Isna Alfaien, 2023).

Kemiskinan di lingkungan sekolah dasar masih menjadi tantangan yang cukup kompleks dan multidimensional. Anak-anak dari keluarga kurang mampu sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses Pendidikan, seperti keterbatasan biaya, kurangnya fasilitas pendukung yang memadai, serta rendahnya motivasi belajar akibat kondisi sosial-ekonomi yang tidak mendukung (Amaliyah et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi permasalahan ini, salah satunya yaitu melalui penguatan peran Kurikulum Merdeka dan SDGs dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan para siswa (Fitriyah & Nugraheni, 2024).

Penerapan Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada pembelajaran yang berbasis proyek dan diferensiasi dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan keterlibatan siswa dari berbagai latar belakang (Fadil & Isna Alfaien, 2023). Dengan memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi lokal, pendekatan ini memungkinkan adanya inovasi dalam metode pengajaran yang lebih inklusif dan relevan bagi siswa dari keluarga kurang mampu (Amaliyah et al., 2025). Selain itu, integrasi prinsip-prinsip SDGs dalam kurikulum juga dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Fitriyah & Nugraheni, 2024).

Dalam jurnal ini, akan dibahas bagaimana Kurikulum Merdeka dan SDGs dapat berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan inklusif di sekolah dasar sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Kajian ini akan menguraikan konsep pendidikan inklusif, relevansi Kurikulum Merdeka dalam mendukung keberagaman peserta didik, serta implementasi SDGs dalam sistem pendidikan dasar (Fadil & Isna Alfaien, 2023). Dengan melakukan pendekatan yang berbasis penelitian dan analisis kebijakan, diharapkan jurnal ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi para pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Amaliyah et al., 2025).

Melalui penguatan peran Kurikulum Merdeka dan SDGs, diharapkan pendidikan inklusif dapat menjadi instrument yang efektif dalam mengatasi kemiskinan di sekolah dasar. Dengan

terciptanya lingkungan belajar yang lebih terbuka, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan para siswa, pendidikan dapat menjadi katalisator bagi perubahan sosial yang lebih luas (Fitriyah & Nugraheni, 2024). Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dan inklusif (Fadil & Isna Alfaien, 2023; Sukri et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan literature review untuk mengkaji peran Kurikulum Merdeka dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam mewujudkan pendidikan inklusif guna mengatasi kemiskinan di sekolah dasar. Literature review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai penelitian serta kebijakan terkait yang telah diterbitkan sebelumnya (Sukri et al., 2024).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan, serta publikasi dari organisasi internasional yang bergerak di bidang pendidikan dan pembangunan berkelanjutan (Hasan et al., 2024). Basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan Web of Science digunakan untuk memperoleh referensi yang relevan dan berkualitas tinggi (Sukri et al., 2024). Seleksi literatur dilakukan berdasarkan tingkat keterkaitan dengan topik penelitian, kredibilitas penulis dan penerbit, serta kontribusi terhadap pemahaman mengenai pendidikan inklusif dan pengurangan kemiskinan melalui kebijakan pendidikan (Hasan et al., 2024).

Analisis literatur dilakukan dengan cara mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama yang muncul dari berbagai sumber yang telah dikaji (Sukri et al., 2024). Fokus utama dalam analisis ini adalah bagaimana Kurikulum Merdeka dapat memberikan dampak positif bagi siswa dari kelompok kurang mampu, bagaimana pendekatan inklusif dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum, serta bagaimana hal tersebut sejalan dengan tujuan SDGs dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk semua (Hasan et al., 2024). Literature review memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren dari berbagai penelitian terdahulu sehingga dapat disusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan berbasis bukti (Sukri et al., 2024).

Selain itu, penelitian ini juga menelaah tantangan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah dasar, terutama dalam kaitannya dengan aspek inklusivitas dan pengentasan kemiskinan (Hasan et al., 2024). Dengan membandingkan hasil penelitian dari berbagai negara dan sistem pendidikan, penelitian ini berusaha menemukan strategi yang efektif dalam mengoptimalkan peran kurikulum sebagai alat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok marginal (Sukri et al., 2024). Literature review menjadi metode yang tepat untuk memahami dinamika kebijakan pendidikan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi potensi solusi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks SDGs (Hasan et al., 2024).

Hasil kajian yang diperoleh melalui literature review diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Sukri et al., 2024). Dengan memahami bagaimana Kurikulum Merdeka dapat mendukung pencapaian SDGs dan mengurangi kemiskinan di sekolah dasar, penelitian ini memberikan dasar ilmiah bagi para pemangku kepentingan dalam merancang strategi pendidikan yang lebih efektif dan berbasis pada bukti akademik (Hasan et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kurikulum Merdeka sebagai Pendekatan Fleksibel dalam Pendidikan Inklusif

Kurikulum Merdeka dapat memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam melaksanakan

pembelajaran, juga dapat memungkinkan guru untuk menyesuaikan dengan materi, metode, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik, termasuk siswa yang berkebutuhan khusus. Pendekatan ini juga dapat mengakomodasikan keberagaman kemampuan dan gaya belajar seseorang, sehingga dalam pembelajaran dapat lebih personal dan efektif. Fleksibilitas tersebut juga dapat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang sangat penting dalam pendidikan inklusif untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya (Surtini & Nenden Ineu Herawati, 2024; Yunus et al., 2023).

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga dapat memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik lokal dan kebutuhan setiap siswa. Hal ini dapat memungkinkan sekolah inklusif dapat merancang program pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap keberagaman siswa, serta dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Dengan demikian, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif bagi semua peserta didik (Oktaviani et al., 2024a; Rohmad et al., 2024).

Dalam kurikulum merdeka ini Pengembangan Profil Pancasila dapat menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, kemandirian, dan kebhinekaan global yang sangat relevan untuk pendidikan inklusif. Nilai-nilai yang tercantum dapat mendorong terciptanya suasana belajar yang dapat menghargai perbedaan dan dapat memfasilitasi kolaborasi antar siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka ini tidak hanya fokus pada aspek akademik saja, tetapi juga fokus pada pembentukan karakter yang inklusif dan toleran (Surtini & Nenden Ineu Herawati, 2024).

Dalam hal ini peran guru sangat vital dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah inklusif. Guru dilatih untuk memahami semua kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus serta harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, termasuk penggunaan asesmen yang sesuai. Platform Merdeka Mengajar (PMM) juga menjadi salah satu sarana penting yang menyediakan modul-modul pembelajaran dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola setiap individu dan jelas secara efektif (I Komang Winata, 2024; Rohmad et al., 2024).

Penilaian dalam kurikulum merdeka bersifat holistik dan berfokus pada proses pembelajaran. Guru melakukan asesmen berkelanjutan untuk memantau perkembangan setiap siswa secara menyeluruh serta untuk menyesuaikan dengan pembelajaran apabila diperlukan. Pendekatan ini sangat penting dalam pendidikan inklusif, karena hal ini dapat memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan dukungan yang tepat bagi siswa dengan kebutuhan khusus (Surtini & Nenden Ineu Herawati, 2024; Yunus et al., 2023).

Dukungan dan kebijakan dari pemerintah dapat memperkuat pelaksanaan kurikulum merdeka dalam pendidikan inklusif. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2024 memberikan payung hukum yang jelas untuk implementasi kurikulum ini di seluruh jenjang pendidikan. Regulasi ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan yang inklusif dan adaptif bagi semua individu, serta memberikan arahan teknis bagi pelaksanaan pendidikan inklusif yang terintegrasi dalam kurikulum merdeka (Yunus et al., 2023).

Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai di sekolah inklusif dapat menjadi faktor pendukung yang penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Selain itu, keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga dapat membantu melakukan identifikasi dan penyesuaian pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Dengan dukungan ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah dan kondusif bagi semua individu sehingga pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal (Oktaviani et al., 2024; Rohmad et al., 2024).

Kurikulum Merdeka dapat mendorong penerapan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Metode-metode yang diterapkan pun dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pemecahan masalah yang nyata dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta kreativitas.

Pendekatan ini sangat efektif untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan kemampuan serta minat siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus yang belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dan kontekstual (I Komang Winata, 2024; Surtini & Nenden Ineu Herawati, 2024).

Pembelajaran berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka menggunakan strategi duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan setiap siswa. Duplikasi memperkuat pemahaman melalui pengulangan, modifikasi menyesuaikan dengan materi, substitusi mengganti materi dengan alternatif yang lebih sesuai, serta misi menghilangkan bagian yang tidak relevan atau bagian yang terlalu sulit. Tujuan dari strategi ini yaitu untuk memastikan agar semua siswa memiliki kesempatan belajar yang setara dan optimal sesuai dengan kebutuhan mereka (Oktaviani et al., 2024; Rohmad et al., 2024).

Implementasi Kurikulum Merdeka dalam pendidikan inklusif menyediakan akses belajar yang setara serta melakukan pendekatan holistik untuk mengembangkan potensi setiap individu secara maksimal. Dengan adanya dukungan kebijakan, pelatihan guru, sarana prasarana, serta metode pembelajaran yang fleksibel, Kurikulum Merdeka menjadi model pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman peserta didik di Indonesia (Surtini & Nenden Ineu Herawati, 2024; Yunus et al., 2023).

B. Pendidikan Inklusif sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan

Pendidikan inklusif merupakan salah satu pendekatan yang menekankan kepada kesetaraan akses pendidikan bagi semua individu, termasuk mereka yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Konsep ini mengakar pada prinsip “*Education for All*” yang diusung oleh UNESCO yang memfokuskan dan menekankan pada pentingnya akses Pendidikan yang layak dan setara bagi semua anak, terlepas dari latar belakang kehidupan (sosial dan ekonomi) mereka. Pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup di masa depan (Setyawan, 2024).

Dalam konteks kemiskinan, pendidikan inklusif berperan sebagai hal yang paling utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan akses pendidikan berkualitas memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di masa depan, sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan untuk memperbaiki taraf hidup. Pendidikan inklusif juga dapat membantu untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu saja, tetapi pendidikan inklusif juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan setara. Dengan adanya sistem pendidikan inklusif, anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi dapat belajar bersama dalam satu lingkungan yang mendukung keberagaman dan kesetaraan. Hal ini memungkinkan untuk mengembangkan keterampilan sosial mereka dalam kehidupan yang profesional dan sosial (Yunus et al., 2023).

Salah satu dampak utama dari Pendidikan inklusif terhadap upaya kemiskinan adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja bagi individu yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses pendidikan. Anak-anak yang mendapatkan Pendidikan inklusif memiliki keterampilan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak (Setyawan, 2024). Dengan pendidikan yang lebih baik, mereka dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Namun, implementasi pendidikan inklusif ini masih banyak menghadapi tantangan-tantangan, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan. Salah satu hambatan utamanya yaitu kurangnya infrastruktur pendidikan yang mendukung siswa dari keluarga yang kurang mampu. Masih banyak sekolah yang ada dalam keterbatasan menyediakan fasilitas yang baik dan layak bagi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Selain itu, terdapat stigma sosial terhadap pendidikan inklusif dimana beberapa sekolah masih menganggap bahwa pendidikan inklusif hanya

diperuntukkan kepada siswa dengan kebutuhan yang khusus (Oktaviani et al., 2024).

Minimnya pelatihan bagi guru dalam menerapkan model dan metode pembelajaran inklusif juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi pendidikan inklusif. Seorang guru juga perlu untuk memahami cara mengimplementasikan dan mengadaptasikan kurikulum agar sesuai dengan berbagai kebutuhan siswa dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Tanpa pelatihan yang maksimal dan memadai, guru bisa saja mengalami kesulitan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung semua siswa (Yunus et al., 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan seperti peningkatan pelatihan bagi guru, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif. Pemerintah dan lembaga pendidikan juga perlu untuk berinvestasi dalam penyediaan fasilitas yang mendukung dan memadai pendidikan inklusif, seperti fasilitas akses teknologi dan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi semua warga pendidikan (Setyawan, 2024).

Selain itu, kolaborasi antara sekolah, Masyarakat, serta pemerintah sangatlah penting untuk dapat menciptakan sebuah lingkungan pendidikan inklusif dan mendukung pengentasan kemiskinan. Pendidikan inklusif ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya kerja sama yang baik, pendidikan inklusif dapat dijadikan sebagai Solusi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan (Oktaviani et al., 2024).

Pendidikan inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan dengan memberikan fasilitas dan akses terhadap pendidikan yang setara bagi semua individu. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas, setiap individu yang berasal dari sebuah keluarga yang kurang mampu untuk dapat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, tantangan dalam pengimplementasiannya masih perlu untuk diatasi melalui peningkatan pelatihan bagi guru, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, serta kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusif (Yunus et al., 2023).

Dengan adanya pendidikan inklusif yang diterapkan secara optimal, diharapkan kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi dapat berkurang. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang memberikan akses terhadap pendidikan semua anak dari keluarga yang kurang mampu saja, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang adil serta setara bagi seluruh individu. Oleh karena itu, pendidikan inklusif harus terus diperkuat sebagai bagian dari strategi nasional dalam mengatasi kemiskinan serta untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Setyawan, 2024).

C. Tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Pendidikan Inklusif

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tantangan signifikan yang dihadapi ketika proses pelaksanaan Kurikulum Merdeka adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai di banyaknya sekolah, khususnya sekolah yang terletak di wilayah-wilayah terpencil. Kondisi inilah yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi yang menjadi poin utama dalam Kurikulum Merdeka. Ketidakterediaan fasilitas tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam mengoptimalkan proses pembelajaran bagi guru untuk menyesuaikan dengan standar Kurikulum Merdeka, sehingga dapat mengakibatkan potensi pengembangan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan berpikir kritis siswa menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, peningkatan sebuah kualitas serta pemerataan baik sarana maupun prasarana di bidang pendidikan menjadi aspek penting yang harus ditangani agar proses penerapan Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara maksimal serta merata di seluruh Indonesia (Sucipto et al., 2024).

2. Kesiapan dan Kompetensi Guru dalam Penggunaan Teknologi

Profesi guru memegang peranan yang penting terutama dalam tercapainya keberhasilan Kurikulum Merdeka, namun masih banyak guru yang masih perlu peningkatan dalam kompetensi mereka dalam pemanfaatan teknologi dalam pendidikan secara optimal. Keterbatasan kemampuan tersebut menjadi kendala dalam mengelola pembelajaran sehingga dampak positif yang diharapkan masih belum sepenuhnya dirasakan oleh peserta didik (Rahmawati, 2023). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru dalam literasi digital dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan (Sucipto et al., 2024).

3. Kesulitan dalam Evaluasi Pembelajaran

Banyaknya guru yang masih menghadapi kesulitan dalam merancang instrumen evaluasi yang tepat, valid, dan objektif yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat berpotensi menghambat kemampuan guru dalam proses penilaian yang akurat terhadap pencapaian peserta didik. Oleh sebab itu, proses monitoring dan pengembangan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menjadi kurang optimal (Sucipto et al., 2024).

4. Keterbatasan Sosialisasi dan Pelatihan bagi Guru

Proses sosialisasi dan pelatihan mengenai Kurikulum Merdeka sebagian besar dilakukan secara daring menimbulkan tantangan bagi para guru. Banyaknya guru yang belum memahami sepenuhnya kurikulum baru ini dapat menyebabkan guru-guru tersebut harus menjalankan proses pembelajaran sambil belajar, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakefisienan dan kebingungan dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, sangat diperlukan pelatihan yang lebih baik lagi baik secara daring maupun tatap muka, agar guru dapat menguasai kurikulum secara komprehensif dan percaya diri dalam menerapkannya (Lestariningsih & Rohmadi, 2025).

5. Kendala dalam Penyusunan Kurikulum Operasional Sekolah

Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang telah sesuai dengan semua prinsip Kurikulum Merdeka dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi beberapa sekolah. Guru serta tenaga kependidikan membutuhkan waktu, bimbingan, dan dukungan untuk dapat menyusun dokumen kurikulum yang bersifat fleksibel, kontekstual, dan relevan terhadap kebutuhan peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Terutama dalam merumuskan capaian pembelajaran dan modul ajar yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan kolaborasi antar yang berkepentingan. Pendampingan yang sistematis dan sumber daya yang memadai sangat diperlukan agar penyusunan KOSP ini dapat berjalan secara optimal (Lestariningsih & Rohmadi, 2025).

6. Ketimpangan Implementasi antara Wilayah Perkotaan dan Daerah 3T

Sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) menghadapi keterbatasan dalam akses pelatihan guru, supervisi pembelajaran, hingga sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Kondisi ini menyebabkan proses implementasi Kurikulum Merdeka berjalan tidak merata serta belum optimal di seluruh wilayah Indonesia. Upaya dalam pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan akses pelatihan, penguatan supervisi,

serta penyediaan fasilitas yang memadai di daerah 3T harus dijadikan prioritas paling utama agar kesenjangan pendidikan dapat diminimalisir (Sucipto et al., 2024).

7. Rendahnya Keterlibatan Orang Tua dan Lingkungan Sekolah

Rendahnya partisipasi yang aktif dari orang tua serta juga masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Merdeka masih tergolong rendah, sehingga banyak orang tua yang belum memahami perubahan pola pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan dukungan terhadap proses belajar anak di rumah maupun dalam lingkungan sekolah menjadi kurang maksimal, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif pada motivasi dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang lebih mandiri dan berorientasi pada pengembangan karakter. Oleh karena itu, diperlukan sangat sistematis untuk dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan orang tua melalui sosialisasi, keterlibatan kegiatan sekolah, serta pemberdayaan komunitas pendidikan (Lestariningsih & Rohmadi, 2025).

8. Beban Administratif yang Meningkat bagi Guru

Pada saat ini, banyak guru yang kurang fokus pada inovasi pembelajaran dan pengembangan profesional secara berkelanjutan. Hal tersebut dikarenakan banyak guru menghadapi beban administratif yang cukup berat, mulai dari pelaporan, dokumentasi, hingga pengelolaan data pembelajaran yang semakin kompleks. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan proses administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meringankan beban guru, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas utama sebagai fasilitator pembelajaran (Fatimatuzzahrah et al., 2023).

9. Keterbatasan Sumber Belajar dan Bahan Ajar

Pada saat ini, terdapat banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menemukan bahan ajar yang relevan, kontekstual, dan mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa serta berbasis proyek yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan bahan ajar dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik Kurikulum Merdeka. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Kurikulum Merdeka di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan proses administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat meringankan beban guru, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas utama sebagai fasilitator pembelajaran (Fatimatuzzahrah et al., 2023).

10. Perlunya Sinergi dan Dukungan Berkelanjutan dari Semua Pihak

Keberhasilan dalam implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kerjasama yang kuat antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak sekolah, guru, orang tua murid, serta masyarakat luas. Dukungan kebijakan yang konsisten, pelatihan yang disertai pendampingan berkelanjutan, serta alokasi sumber daya yang memadai menjadi faktor kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang hadir. Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara efektif dan dapat memberikan banyak dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan di Indonesia dengan adanya kolaborasi serta komitmen bersama. Sinergi ini juga harus mencakup pemanfaatan teknologi, inovasi pembelajaran, serta penguatan peran komunitas pendidikan secara menyeluruh (Fatimatuzzahrah et al., 2023).

D. Solusi dan Rekomendasi untuk Penguatan Pendidikan Inklusif

1. Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Sekolah Inklusif

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan inklusif di Indonesia masih belum dilaksanakan secara optimal, salah satu faktornya adalah ketidakmerataan akses dan fasilitas fisik yang belum ramah bagi seluruh siswa, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Infrastruktur yang masih belum memadai seperti bangunan sekolah yang tidak aksesibel, ketidaksediaannya fasilitas pendukung, serta sumber daya yang masih terbatas dapat menyebabkan ketimpangan kualitas layanan pendidikan inklusif di berbagai daerah. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur yang ramah dan aksesibel harus menjadi prioritas utama untuk dapat menjamin kesempatan belajar yang setara bagi seluruh siswa (Firdausyi, 2024).

2. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan Khusus dan Berkelanjutan

Kualitas dari pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi guru dalam mengelola kelas. Banyak guru yang masih belum mendapatkan pelatihan khusus yang memadai untuk dapat memahami kebutuhan peserta didik, terutama dalam menerapkan strategi pembelajaran yang efektif dan inklusif. Pelatihan yang berkelanjutan ini perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pemahaman guru tentang pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap perbedaan pada setiap kemampuan yang dimiliki oleh para siswa (Firdausyi, 2024).

3. Penyesuaian dan Pengembangan Kurikulum yang Fleksibel

Kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan inklusif harus mampu dalam mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik dengan cara memberikan ruang fleksibilitas yang memungkinkan guru dapat menyesuaikan materi serta metode pembelajaran yang selaras dengan potensi dan kebutuhan pada setiap diri siswa. Pendekatan kurikulum tersebut dapat memberikan fasilitas pembelajaran yang lebih personal serta memiliki bermakna, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar seluruh siswa (Rida Melinda et al., 2024).

4. Penguatan Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Secara Komprehensif

Implementasi pendidikan inklusif sangat memerlukan dukungan kebijakan yang kuat serta dana yang memadai. Peran pemerintah disini juga sangat perlukan untuk memperkuat regulasi, memberikan insentif, serta melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif pada semua tingkat sekolah. Dukungan dari pemerintah tersebut harus mencakup penyediaan fasilitas, pelatihan guru, serta kampanye mengenai kesadaran masyarakat dengan tujuan pendidikan inklusif dapat berjalan secara optimal (Biantoro, 2024).

5. Membangun Kesadaran dan Sikap Positif terhadap Keberagaman di Sekolah

Pendidikan inklusif tidak hanya soal akses dan fasilitas, tetapi juga tentang Pendidikan inklusif tidak hanya mengenai akses maupun sarana dan prasarana, namun juga mengenai keberagaman. Setiap edukasi dan sosialisasi yang insentif kepada guru, siswa, maupun masyarakat sangat penting untuk dapat menghilangkan stigma serta diskriminasi.

Dengan cara menumbuhkan sikap saling menghargai pembangunan budaya sekolah yang inklusif dan ramah terhadap setiap dan toleransi, maka hal tersebut dapat menciptakan lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman serta mendukung semua peserta didik (Teni Susanti & Nenden Ineu Herawati, 2024).

6. Pengembangan Model Pembelajaran yang Variatif dan Adaptif

Model pembelajaran yang variatif seperti pembelajaran yang kooperatif, diferensiasi, serta pembelajaran yang berbasis proyek sangat dianjurkan dalam pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan metode yang digunakan dapat memungkinkan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan gaya dan kecepatan belajar siswa yang berbeda, sehingga semua siswa dapat terlibat aktif dan memperoleh pengalaman yang berbeda (Bayu Kurniawan et al., 2024).

7. Kolaborasi Sinergis antara Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas

Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada keterlibatan dari banyaknya pihak. Kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua siswa, maupun masyarakat perlu diperkuat agar tercipta dukungan yang holistik bagi perkembangan akademik dan sosial seluruh peserta didik. Pendekatan ini juga dapat membantu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul di luar lingkungan sekolah (Biantoro, 2024).

8. Pemanfaatan Teknologi Pendidikan untuk Mendukung Pembelajaran Inklusif

Teknologi merupakan salah satu alat bantu yang cukup efektif dalam pendidikan inklusif. Penggunaan media pembelajaran digital yang interaktif dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa yang memungkinkan guru juga dapat memberikan pengalaman dalam belajar yang lebih personal dan lebih menarik kepada seluruh siswa. Teknologi juga dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan dapat memfasilitasi akses belajar bagi siswa yang memiliki hambatan fisik ataupun geografis (Rida Melinda et al., 2024).

9. Evaluasi dan Penelitian Berkelanjutan sebagai Dasar Pengembangan Pendidikan Inklusif

Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif secara berkala serta penelitian yang mendalam sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan untuk mengukur efektivitas berbagai program. Data evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan, sehingga pendidikan yang inklusif dapat selalu berkembang dan dapat memberikan banyak manfaat yang maksimal bagi seluruh siswa (Biantoro, 2024).

KESIMPULAN

Pendidikan yang inklusif memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan akses setara kepada semua peserta didik, termasuk peserta didik yang memiliki latar belakang ekonomi yang lemah. Kurikulum Merdeka hadir sebagai pendekatan fleksibel yang mendorong pembelajaran adaptif dan berdiferensiasi, sejalan dengan prinsip inklusivitas. Prinsip-prinsip SDGs, terutama tujuan keempat tentang "Pendidikan Berkualitas", memperkuat komitmen global untuk pemerataan akses pendidikan.

Namun, implementasi pendidikan inklusif melalui Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, kompetensi guru, ketimpangan wilayah, serta rendahnya keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh,

termasuk penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana-prasarana, dan sinergi antar pemangku kepentingan.

Dengan kolaborasi lintas sektor, pendidikan inklusif berbasis Kurikulum Merdeka dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan menciptakan masa depan yang sejahtera dan adil bagi seluruh anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, H., Oktapia, E., Mastio, R., Raden, U., & Palembang, F. (2025). KURIKULUM MERDEKA SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA. 5(1), 2025. <https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial>
- Bayu Kurniawan, Laikha Listiyani, Siti Fatimah, Minsih, & Ernawati. (2024). STRATEGI PENDIDIKAN INKLUSI TERHADAP PERKEMBANGAN AKADEMIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09, 267–277.
- Biantoro, O. F. (2024). Pendidikan Inklusif di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1697>
- Fadil, K., & Isna Alfaien, N. (2023). PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR MELALUI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM MEWUJUDKAN SUISTANABLE DEVELOPMENTS GOAL'S. In *Attadib: Journal of Elementary Education* (Vol. 7, Issue 2). <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/download/1944/805>
- Fatimatuzzahrah, Lulu Sakinahz, & Siti Alikha Alyasari. (2023). Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah: Tantangan Membangun Kualitas Pendidikan. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(1), 43–53. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i1.2339>
- Firdausyi, M. F. (2024). *Educatus: Jurnal Pendidikan* MUTU PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI INDONESIA. *Educatus: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 9–15. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i2.12>
- Fitriyah, A., & Nugraheni, N. (2024). Peran Pendidikan dalam (Fitriyah, dkk) Madani. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 202–209. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11141726>
- Hasan, H., Wayan Lesmawan, I., & Suastra, W. (2024). Equilibrium: Jurnal Pendidikan Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar Systematic Literature Review. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(3), 295–302. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- I Komang Winata. (2024). PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM KONTEKS KURIKULUM MERDEKA: TANTANGAN DAN SOLUSI. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7, 8089–8093. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Lestariningsih, N., & Rohmadi, M. (2025). Tantangan dan Evaluasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Sekolah di Kota Palangka Raya. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(01), 1–11. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v5i01.5517>
- Oktaviani, L., Gunarsih, D., Awaludin, J., & Biologi, P. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Inklusi di Sekolah Menengah Pertama Kota Tangerang. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i2.6473>
- Teni Susanti, & Nenden Ineu Herawati. (2024). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR KABUPATEN BANDUNG BARAT. 2, 65–72. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i2.3096>
- Rida Melinda, Ahmad Suriansyah, & Wahdah Refia Refianti. (2024). Pendidikan Inklusif: Tantangan dan Peluang dalam Implementasinya di Indonesia. *Harmoni Pendidikan : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 337–343. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1096>

- Rohmad, B., Suriansyah, A., & Novitawati, N. (2024). Penyelarasan Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Inklusi di Taman Kanak-Kanak Banjarmasin. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 501–512. <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.901>
- Setyawan, A. (2024). KURIKULUM MERDEKA DAN PEMBELAJARAN INKLUSIF: UPAYA MENGINTEGRASIKAN NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DASAR. *Jurnal Pendidikan Islam*, 21(1), 2024.
- Sucipto, Sukri, M., Elizabeth Patras, Y., & Novita, L. (2024). Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12, 278–285.
- Sukri, M., Elizabeth Patras, Y., & Novita, L. (2024). Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review. *Kalam Cendekia*, 12, 278–284. <https://jurnal.uns.ac.id/jkc/article/view/84353>
- Surtini, & Nenden Ineu Herawati. (2024). Upaya Mewujudkan Sekolah Inklusif: Sekolah Ramah Anak Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Simpaty*, 2(3), 82–94. <https://doi.org/10.59024/simpaty.v2i3.817>
- Yunus, V., Zakso, A., Priyadi, A. T., & Hartoyo, A. (2023). PENDIDIKAN INKLUSIF PADA KURIKULUM MERDEKA. *JURNAL PENDIDIKAN DASAR PERKHASA: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 9(2), 313–327. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v9i2.2270>